



**TAHUN
2024**

RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH
Tahun Anggaran 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin-Nya Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Prabumulih dapat menyelesaikan Laporan RENJA Tahun 2024.

Renja Tahun 2024 ini berisi Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, realisasi anggaran Program/Kegiatan tahun sebelumnya (2022). Renja Tahun 2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab di dalam proses pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Prabumulih. Penyusunan Renja Tahun 2024 bertujuan merumuskan kebijakan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif serta tepat sasaran mengacu kepada RENSTRA 2024-2026.

Kami menyadari Laporan RENJA Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna oleh karena masukan dan saran senantiasa kami harap untuk perbaikan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan RENJA Tahun 2024 yang akan datang.

Prabumulih, Mei 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kota Prabumulih,



Suranti, SP

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19640325 198708 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
A. Maksud	5
B. Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DKP Kota dan Capaian RENSTRA DKP.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKP	28
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	36
3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi	36
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.....	38
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	52
Bab V Penutup	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2022	8
Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RENJA DKP Tahun 2022 dan Realisasi RENSTRA.....	14
Tabel 2.3 Pencapaian Kineja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	27
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Prabumulih	35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	39
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Prabumulih.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki, maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2024-2026, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran Program dan Kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi PD untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

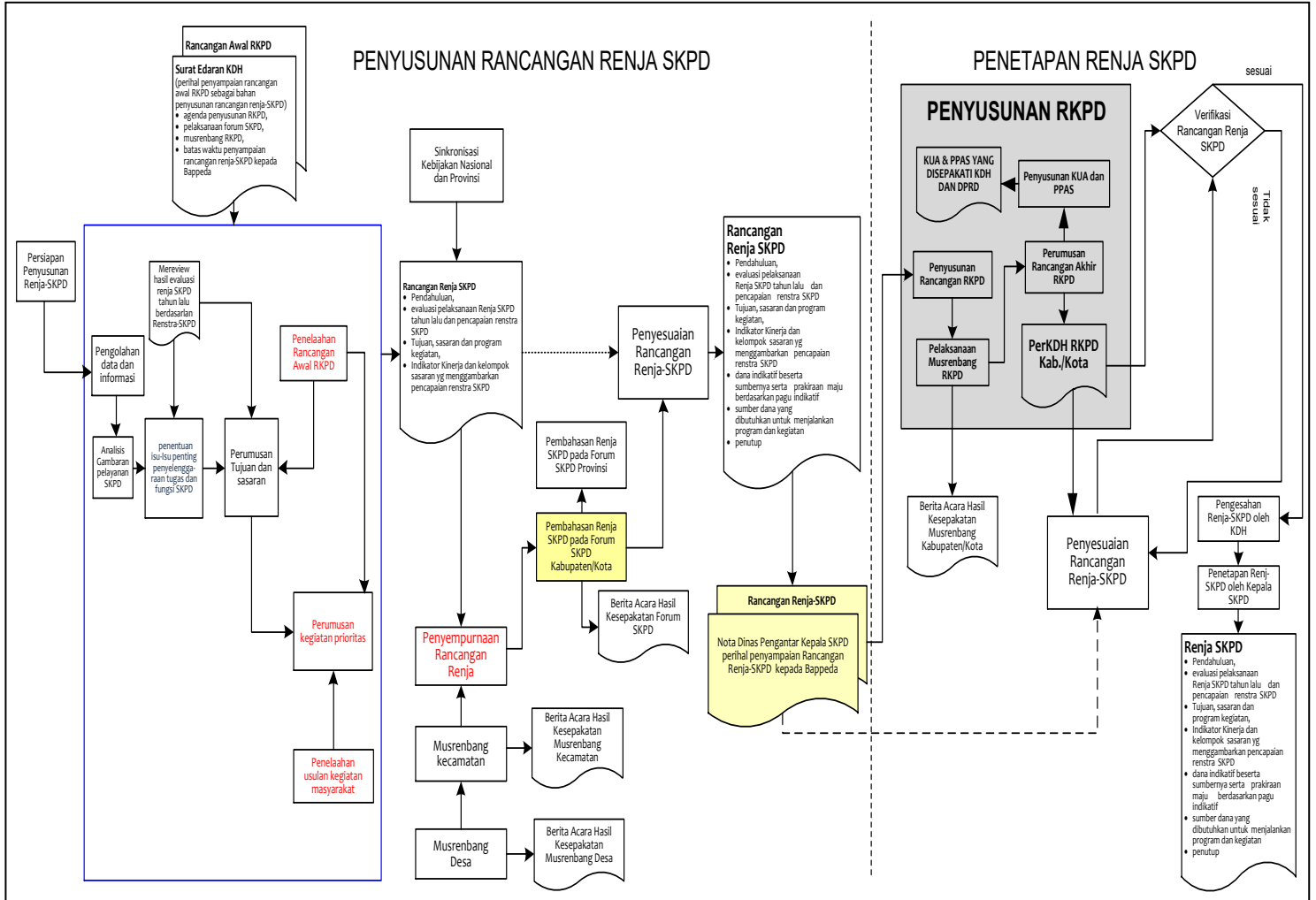
Kebijakan umum pemerintah Kota Prabumulih dalam pembangunan ketahanan pangan adalah untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja sub sistem ketahanan pangan serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk. Kebijakan tersebut disusun melalui proses identifikasi isu-isu penting dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan dan kecukupan gizi, dilanjutkan dengan perumusan kebijakan untuk menindaklanjuti, mengantisipasi atau mengatasi isu-isu dimaksud. Kebijakan ini dikelompokkan dalam kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka menengah.

Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kerawanan pangan *transient* (mendadak) serta kronis. Dalam hal kerawanan *transient*, kebijakan diarahkan untuk mengatasi situasi yang bersifat darurat sedangkan dalam hal kerawanan kronis, kebijakan diarahkan untuk memberikan bantuan dan meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangannya.

Kebijakan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan cadangan pangan, peningkatan distribusi dan stabilitas pasokan dan harga pangan, pola konsumsi dan keamanan pangan segar bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan. Disamping itu, untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat, kebijakan jangka menengah juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi tanaman pekarangan, mendorong proses penganekaragaman pangan serta meningkatkan jaminan bagi setiap penduduk untuk memperoleh pangan yang cukup.

Dalam penyusunan Renja PD, dibutuhkan keselarasan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yaitu: RPD Kota Prabumulih 2024-2026, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar 1. berikut ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tahun 2024 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam proses pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Prabumulih yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Perencanaan Strategis (renstra) dalam lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) setiap satu tahun sekali
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Prabumulih

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang penyusunan RENJA, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan RENJA dan sistematika penulisan dokumen RENJA.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian RENSTRA PD. analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan rencana kerja perangkat daerah dan sumber pendanaan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Prabumulih tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Ketahanan pangan Kota Prabumulih dalam melaksanakan program dan kegiatannya tahun lalu, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA DKP Kota Prabumulih, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DKP Kota dan Capaian RENSTRA DKP

Evaluasi pelaksanaan RENJA DKP Kota Prabumulih tahun lalu dan pencapaian kinerja RENSTRA Kota Prabumulih ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu (Tahun 2022) yang dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA DKP Kota Prabumulih berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Adapun program dan kegiatan APBD Tahun 2022 yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Fisik Dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Dana		Realisasi	
					Keuangan	Fisik
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.793.523.463	3.793.523.463	3.487.570.774	91,93%
1.1	Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.940.000	14.940.000	14.137.000	94,63%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja	1.000.000	1.000.000	840.000	84,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Induk	1.000.000	1.000.000	890.000	89,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan	1.000.000	1.000.000	890.000	89,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja	1.000.000	1.000.000	900.000	90,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Maturitas SPIP	6.405.000	10.940.000	10.617.000	97,05%
		Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi	4.535.000			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.821.697.463	2.821.697.463	2.617.070.213	92,75%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.770.867.463	2.770.867.463	2.580.291.213	93,12%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumentasi Analisis Jabatan (ANJAB) OPD	350.000	350.000	300.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	48.480.000	48.480.000	34.800.000	71,78%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1.000.000	1.000.000	886.000	88,60%

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Dana		Realisasi	
					Keuangan	Fisik
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	1.000.000	1.000.000	793.000	79,30%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		13.200.000	13.200.000	7.200.000	54,55%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Anggaran Untuk Pembayaran Honorarium Pengelola Barang Daerah	13.200.000	13.200.000	7.200.000	54,55%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		150.000	150.000	-	0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga	150.000	150.000	-	0,00%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		504.762.000	504.762.000	491.114.211	97,30%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1.110.000	1.110.000	510.000	45,95%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor, Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	4.060.000	4.060.000	4.050.000	99,75%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4.950.000	4.950.000	4.710.000	95,15%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	60.000	60.000	-	0,00%
	Penyediaan Bahan/Materail	Tersedianya Alat Tulis Kantor	16.400.000	16.400.000	13.321.000	81,23%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Anggaran untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	360.182.000	478.182.000	468.523.211	97,98%

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Dana		Realisasi	
					Keuangan	Fisik
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Tersedianya Anggaran untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	118.000.000			
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		350.065.000	350.065.000	281.925.000	80,54%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Anggaran untuk Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas	350.000.000	350.000.000	281.925.000	80,55%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Anggaran untuk Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	65.000	65.000	-	0,00%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		220.000	220.000	220.000	100,00%
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Tersedianya Materi dan Perangko	220.000	220.000	220.000	100,00%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		88.489.000	88.489.000	75.904.350	85,78%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Anggaran untuk Membayar Pajak Kendaraan Dinas, Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	87.759.000	87.759.000	75.184.350	85,67%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Rutin Perangkat Hardware/Software	730.000	730.000	720.000	98,63%
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.246.250.000	1.246.250.000	1.124.840.609	90,26%

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Dana		Realisasi	
					Keuangan	Fisik
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		188.400.000	188.400.000	161.003.600	85,46%
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tereksposnya Data Informasi Pangan Ke Sektor Publik	15.000.000	27.100.000	20.886.300	77,07%
		Tersedianya Laporan NBM PPH Kota Prabumulih	12.100.000			
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Kreasi Baru Pangan Olahan Berbasis Sumber daya Lokal	100.380.000	100.380.000	83.552.800	83,24%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya Laporan Akses Pangan Masyarakat	13.000.000	13.000.000	12.695.000	97,65%
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terpantaunya Ketersediaan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok	12.000.000	35.820.000	32.261.500	90,07%
		Tersedianya Laporan Harga Pangan Pokok 16 Komoditi	11.720.000			
		Tersedianya Laporan Stok/Pasokan Pangan Kota Prabumulih	12.100.000			
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Tersusunnya Laporan Data Kelembagaan Kader Pangan Se-Kota Prabumulih	12.100.000	12.100.000	11.608.000	95,93%
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		44.000.000	44.000.000	3.420.000	7,77%

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Dana		Realisasi	
					Keuangan	Fisik
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah	44.000.000	44.000.000	3.420.000	7,77%
2.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		1.013.850.000	1.013.850.000	960.417.009	94,73%
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun	Tersedianya Laporan PPH Konsumsi Pangan Kota Prabumulih	32.000.000	32.000.000	19.876.809	62,12%
	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga	18.125.000	981.850.000	940.540.200	95,79%
		Terlaksananya Pemberdayaan Pekarangan Melalui P2KP	3.675.000			
		Terlaksananya Pembinaan Kader/Tim B2SA	2.800.000			
		Terlaksananya Pemeliharaan Obor Pangan Lestari	10.000.000			
		Terlaksananya Penilaian Lomba Penilaian Halaman Asri, Indah dan Nyaman	26.000.000			
		Terlaksananya Promosi/Ekspose Produk Pangan Segar/Olahan	25.000.000			
		Terlaksananya pengembangan budidaya jahe merah	185.000.000			

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Dana		Realisasi	
					Keuangan	Fisik
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
		Terlaksananya Pengembangan Sayuran di Lahan Pekarangan	80.000.000			
		Terlaksananya Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari DAK Non Fisik	600.000.000			
		Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Hukum Pekarangan Pangan Lestari DAK Non Fisik	31.250.000			
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		24.200.000	24.200.000	24.090.000	99,55%
3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		12.100.000	12.100.000	12.065.000	99,71%
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	12.100.000	12.100.000	12.065.000	99,71%
3.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		12.100.000	12.100.000	12.025.000	99,38%
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Paket Bantuan Bagi Masyarakat Rawan Pangan	12.100.000	12.100.000	12.025.000	99,38%
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		32.000.000	32.000.000	30.050.000	93,91%
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		32.000.000	32.000.000	30.050.000	93,91%
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Teregistrasinya Kemanan Pangan Segar	17.000.000	17.000.000	15.500.000	91,18%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pengujian Pangan Segar	15.000.000	15.000.000	14.550.000	97,00%
GRAND TOTAL			5.095.973.463	5.095.973.463	4.666.551.383	91,57%

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RENJA DKP Tahun 2022 & Realisasi RENSTRA

Program	Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub kegiatan	Sasaran	Target	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi	Keterangan
Dinas Ketahanan Pangan								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Induk	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Maturitas SPIP	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi			1 dokumen	1 dokumen	100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan TPP Pegawai	14 Kali	14 Kali	100%	
2.09.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumentasi Analisis Jabatan (ANJAB) OPD	1000 lembar	1000 lembar	100%		

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Program	Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub kegiatan	Sasaran	Target	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi	Keterangan
		2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	5 orang/bulan	3 orang/bulan	60%	2 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu tidak dibayarkan dikarenakan berdasarkan perpres 33 tahun 2020
		2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Anggaran Untuk Pembayaran Honorarium Pengelola Barang Daerah	2 orang/bulan	1 orang/bulan	50%	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang tidak terealisasi dikarenakan Pejabat tersebut telah mendapat Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Survei Pakaian Olahraga	1 OH	0	0%	Tidak terlaksana dikarenakan kekurangan anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis	1 Jenis	100%	

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Program	Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub kegiatan	Sasaran	Target	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi	Keterangan
		2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 jenis	1 jenis	100%	
		2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jenis	1 Jenis	100%	
		2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	1 jenis	0	0%	Tidak terlaksana dikarenakan kekurangan anggaran
		2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	26 jenis	20 Jenis	77%	
		2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Anggaran untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	332 OH	332 OH	100%	
	Tersedianya Anggaran untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			786 OH	719 OH	91%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Anggaran untuk Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	100%	
		2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Anggaran Untuk Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Jenis	0	0%	Tidak terlaksana dikarenakan kekurangan anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Perangko	22 materai	22 materai	100%	

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Program	Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub kegiatan	Sasaran	Target	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi	Keterangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Anggaran Untuk Membayar Pajak Kendaraan Dinas	17 unit	17 unit	100%	
				Tersedianya Anggaran Untuk Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	17 unit	17 unit	100%	
		2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Anggaran Untuk Pemeliharaan Rutin Perangkat Hardware/Software	1 jenis	1 jenis	100%	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tereksposnya Data/Informasi Pangan ke Sektor Publik	2 media	2 media	100%	
				Tersedianya Laporan NBM PPH Kota Prabumulih	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Kreasi Baru Pangan Olahan Nanas Berbasis Sumberdaya Lokal	37 KWT	37 KWT	100%	
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya Laporan Akses Pangan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terpantaunya Ketersediaan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok	11 komoditi	11 komoditi	100%	
				Tersedianya Laporan Harga Pangan Pokok 16 Komoditi	1 dokumen	1 dokumen	100%	

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Program	Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub kegiatan	Sasaran	Target	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi	Keterangan
				Tersedianya Laporan Stok/Pasokan Pangan Kota Prabumulih	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Tersusunnya Laporan Data Kelembagaan Kader Pangan Se-Kota Prabumulih	1 dokumen	1 dokumen	100%	

	<p>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</p>	<p>2.09.03.2.02.03</p>	<p>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah</p>	<p>3 Ton</p>	<p>0 ton</p>	<p>0%</p>	<p>Berdasarkan Surat dari Perum BULOG Nomor : B-160.06020.03.2022 tnggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyatakan bahwa untuk sisa beras yang ada di Gudang BULOG sebesar 32, 244 Ton dimana beras yang dititipkan sebelum tahun 2020 sebesar 22,760 Ton yang tidak disepakati untuk dilakukan addendum penyesuaian harga agar segera diambil atau disalurkan, apabila belum disalurkan dan tidak dilakukan addendum tidak dapat melakukan pengadaan atau pembelian beras di tahun 2022 dan tahun selanjutnya. Oleh karena itu Kegiatan Cadangan Pangan Kota Prabumulih tidak dapat dilaksanakan untuk pengadaan terbentur surat dari Perum BULOG tersebut dan untuk penyaluran belum adanya anggaran untuk penyaluran seperti sewa angkut dan biaya ganti kemasan serta pembelian karung ganti kemasan yang semula dianggarkan di APBD Perubahan namun belum disetujui.</p>
--	--	------------------------	--	---	--------------	--------------	-----------	---

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Program	Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub kegiatan	Sasaran	Target	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi	Keterangan
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Laporan PPH Konsumsi Pangan Kota Prabumulih	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga	4 KWT	0	0%	Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan terjadi kesamaan barang yang diserahkan kepada masyarakat yaitu tanaman obat berupa jahe merah di kegiatan lain yaitu pada kegiatan budidaya jahe merah.
Terlaksananya Pemberdayaan Pekarangan Melalui P2KP				3 KWT	3 KWT	100%		
Terlaksananya Pembinaan Kader/Tim B2SA				6 tim	0	0%	Tidak terlaksana dikarenakan kekurangan anggaran	
Terlaksananya Pemeliharaan Obor Pangan Lestari				1 kelompok	1 kelompok	100%		
Terlaksananya Penilaian Lomba Penilaian Halaman Asri, Indah dan Nyaman				6 KWT/ Dasawisma	6 KWT/ Dasawisma	100%		
Terlaksananya Promosi/Ekspose Produk Pangan Segar/Olahan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		

Program	Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub kegiatan	Sasaran	Target	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi	Keterangan
				Terlaksananya pengembangan budidaya jahe merah	26 Kelompok	26 Kelompok	100%	
				Terlaksananya Pengembangan Sayuran di Lahan Pekarangan	35 Kelompok	35 Kelompok	100%	
				Terlaksananya Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari DAK Non Fisik	13 Kelompok	13 Kelompok	100%	
				Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Hukum Pekarangan Pangan Lestari DAK Non Fisik	5 OB	5 OB	100%	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Paket Bantuan Bagi Masyarakat Rawan Pangan	50 Paket	50 Paket	100%	

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Program	Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub kegiatan	Sasaran	Target	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi	Keterangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar	2 komoditi	2 komoditi	100%	
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pengujian Pangan Segar	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Pada umumnya tidak ada hambatan yang sangat berarti dalam pencapaian target dari program dan kegiatan. Secara umum hal-hal yang secara umum agak mempengaruhi kinerja kegiatan adalah:

1. Jumlah SDM di Dinas Ketahanan Pangan yang kurang memadai. SDM dilingkup DKP Kota Prabumulih dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BPPPPKKP) menjadi Dinas Ketahanan Pangan (DKP) sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang baru ini berimplikasi terhadap jumlah pegawai dan Program Kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan di Tahun 2021 mengalami perubahan yang cukup *significant*, dimana semula bergabung antara Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan yang berdiri sendiri, dan Bidang Penyuluhan menjadi bagian dari Dinas Pertanian Kota Prabumulih.
2. Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa belanja kegiatan dipangkas menjadi lebih ekonomis
3. Beberapa kegiatan yang bersifat basis data membutuhkan SDM yang cukup berpengalaman di bidangnya, dan kinerja validitas data cukup terganggu dengan pergantian personil yang cukup intens.

Terkait hal tersebut, Implikasi yang timbul terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan menjadi lebih mengerucut yaitu :

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang cukup
2. Meningkatkan Skor/Angka Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA).
3. Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga dan Pasokan (Stok) Pangan secara konsisten dan *continyu*
4. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Namun untuk mencapai peningkatan dalam target kinerja dalam rangka mendukung visi, misi Pemerintah Daerah, perlu beberapa kebijakan / tindakan dalam perencanaan anggaran tahun depan (Mengacu Kepmendagri-050-5889-Tahun-2021), antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan pangan secara berkesinambungan terkait aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
2. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi perhatian di Bidang Ketahanan Pangan yaitu
 - Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Pertanian/Perkebunan)
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih berisikan capaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan Utama dan Ketersediaan Energi dan Protein perkapita (PPH Ketersediaan)

Ketersediaan Pangan yaitu kondisi tersedianya pangan utama untuk memenuhi kebutuhan penduduk suatu wilayah. Aspek penyusun ketersediaan pangan utama suatu daerah yaitu Produksi, Pasokan dari Cadangan Pangan yang dimiliki. Ketersediaan Energi dan Protein perkapita mengacu kepada Angka kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan lima tahun sekali oleh forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). WKNPG XI merekomendasikan angka kecukupan Gizi dan masukan rumusan RPJMN 2020-2024. Rekomendasi WKNPG XI menetapkan bahwa tingkat ketersediaan energi minimal sebesar 2100 Kkal/Kap/Hari dan Protein 57 Gram /Perkapita/Hari. Dari hasil Analisis yang dilakukan Bidang Ketersediaan Dinas ketahanan Pangan diketahui bahwa tingkat ketersediaan energi Kota Prabumulih sebesar 2.301 kkal/kap/hari dan Protein sebesar 80, 97 gr/Kap/Hari. Ketersediaan pangan Kota Prabumulih sebesar 138 Kg/Kapita/Tahun dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 94,8 %. Interpretasi dari PPH Ketersediaan tahun 2022 bahwa ketersediaan pangan sebesar Kota Prabumulih tergolong surplus dengan capaian sebesar 101,4%. Ketersediaan pangan utama dalam kondisi surplus didukung lokasi strategis kota Prabumulih dan akses infrastruktur yang memadai sampai dengan daerah pelosok.

2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Kinerja Pelayanan Indikator Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditujukan bagi pencapaian target Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Mengacu kepada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 257/1869/DKPP/2018 yaitu 71,39 Ton untuk Kota Prabumulih. Capaian kinerja ditahun 2022 sebesar 0% dari target 13 Ton. Berdasarkan Surat dari Perum BULOG Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyatakan bahwa untuk sisa beras yang ada di Gudang BULOG sebesar 32, 244 Ton dimana beras yang dititipkan sebelum tahun 2020 sebesar 22,760 Ton yang tidak disepakati untuk dilakukan addendum penyesuaian harga agar segera diambil atau disalurkan, apabila belum disalurkan dan tidak dilakukan addendum tidak dapat melakukan pengadaan atau pembelian beras di tahun 2022 dan tahun selanjutnya.

Oleh karena itu Kegiatan Cadangan Pangan Kota Prabumulih tidak dapat dilaksanakan untuk pengadaan terbentur surat dari Perum BULOG tersebut dan untuk penyaluran belum adanya anggaran untuk penyaluran seperti sewa angkut dan biaya ganti kemasan serta pembelian karung ganti kemasan yang semula dianggarkan di APBD Perubahan namun belum disetujui.

Untuk mempermudah proses penyaluran perlu dilakukan revisi Perwako yang ada sebagai dasar hukum dalam proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pada proses revisi Perwako akan dilakukan pada Tahun 2024.

3. Ketersediaan Informasi, Stabilitas Harga dan Pasokan (Stok) Pangan Harga dan Akses Pangan Daerah

Indikator ini menyediakan data dan informasi mencakup komoditas beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/tahunan. Indikator ini mengukur stabil tidaknya harga pangan jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal, sedangkan pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar 5-40%. Capaian Kinerja Program Kegiatan di tahun 2022 mencapai 100% (48 minggu) dengan asumsi bahwa harga/pasokan relatif stabil dengan fluktuasi dibawah 5%. Khusus untuk komoditas pangan utama (Beras) fluktuasi sepanjang tahun 2022 yang dihitung berdasarkan *koefisien variansi* sebesar 3,8%.

4. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan

Indikator ini merupakan penyediaan informasi penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, sesuai standard kecukupan energi dan protein perkapita per hari (PPH). Hal ini menyangkut peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan dan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan. Kota Prabumulih dengan capaian skor PPH Konsumsi pangan sebesar 85,2% di Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,2 % dibanding tahun 2021. Artinya ada peningkatan pengetahuan akan pola konsumsi pangan masyarakat Kota Prabumulih di Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapkan untuk di akhir rencana lima tahunan peningkatan angka konsumsi pangan masyarakat mendekati angka ideal.

Secara ringkas, capaian indikator Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih terlihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

No	Indikator	Target IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai SAKIP	Predikat	B	BB	A					
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	100	100	100					
3	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan	94,1	94,3	94,6					
4	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	Ton	10	15	15					
5	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH Konsumsi	91,2	93,7	96,8					
6	Persentase penurunan daerah rentan rawan pangan	%	2,7	0	0					
7	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100	100					

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKP

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang *significant* bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja utama dimana tingkat kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sudah relatif baik, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum maksimal, sehingga capaian per 31 Desember 2022 sebesar 91,57% (Keuangan). Rasio Capaian kinerja (fisik) untuk 6 (enam) indikator utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 rata-rata adalah 1 yang menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Ketahanan Pangan sudah baik.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sesuai dengan pola pangan harapan untuk menunjang hidup sehat dan produktif. Pola Konsumsi masyarakat sebagian besar kepada kuantitas (kenyang) dan bukan kepada kualitas (gizi) sehingga konsumsi masyarakat terbesar pada beras dan terigu. Perubahan *mindset* inilah yang menjadi pekerjaan rumah DKP yang harus sudah dituntaskan untuk beberapa tahun kedepan.

Selain itu, Cadangan Pangan Pemerintah Juga Belum memenuhi Kuota Minimum mengacu kepada kepada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 257/1869/DKPP/2018 yaitu 71,39 Ton untuk Kota Prabumulih. Jumlah Total beras Cadangan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 48,6 Ton dan telah disalurkan sebanyak 16 Ton. Total Cadangan pangan yang tersimpan di gudang BULOG yaitu 32 Ton (45%) dari Total Kuota Minimum Kota Prabumulih.

Oleh karena itu kegiatan Cadangan pangan diharapkan dapat memenuhi kuota yang diharapkan beberapa tahun mendatang mengacu kepada capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan Surat dari Perum BULOG Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyatakan bahwa untuk sisa beras yang ada di Gudang BULOG sebesar 32, 244 Ton dimana beras yang dititipkan sebelum tahun 2020 sebesar 22,760 Ton yang tidak disepakati untuk dilakukan addendum penyesuaian harga agar segera diambil atau disalurkan, apabila belum disalurkan dan tidak dilakukan addendum tidak dapat melakukan pengadaan atau pembelian beras di tahun 2022 dan tahun selanjutnya. Oleh karena itu Kegiatan Cadangan Pangan Kota Prabumulih tidak dapat dilaksanakan untuk pengadaan terbentur surat dari Perum BULOG tersebut dan untuk penyaluran belum adanya anggaran untuk penyaluran seperti sewa angkut dan biaya ganti kemasan serta pembelian karung ganti kemasan yang semula dianggarkan di APBD Perubahan namun belum disetujui. Untuk mempermudah proses penyaluran perlu dilakukan revisi perwako yang ada sebagai dasar hukum dalam proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pada proses revisi perwako akan dilakukan pada Tahun 2024.

Stabilitas harga pangan berada dalam kondisi cukup stabil dengan angka fluktuasi dibawah 5%. Sepanjang tahun 2022, fluktuasi yang cukup tinggi dirasakan pada komoditi pangan utama (beras) dan pangan segar menjelang hari Besar keagamaan Nasional. Hal ini diantisipasi dengan perlu adanya upaya stabilisasi harga pangan utama dengan penguatan Kelembagaan Pangan melalui TTI (Toko Tani Indonesia). Penetrasi Beras di pasar lokal diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan pokok masyarakat Kota Prabumulih. Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan segar menjelang HBKN ditujukan untuk ringankan beban masyarakat melauai operasi pasar produk pangan segar seperti Cabai, Bawang, Telur dan Ayam. Pada Tahun 2022 diharapkan kegiatan Penguatan Kelembagaan melalui TTI dan Penyediaan Pangan Segar menjelang HBKN dapat dipertimbangkan.

Termasuk ke dalam persoalan yang dihadapi DKP adalah belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan, berbasiskan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA: *Food Security and vulnerability Atlas*). Hal ini dikarenakan pelaksanaan permetaan masih belum menjangkau keseluruhan

Kecamatan di Kota Prabumulih dikarenakan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu diharapkan adanya peningkatan pagu untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran pemetaan untuk Tahun Anggaran 2022.

Permasalahan berikutnya yaitu pengawasan standar mutu keamanan pangan segar di Kota Prabumulih belum optimal. Terlebih lokasi Kota Prabumulih yang strategis sehingga mobilitas barang masuk dan keluar cukup tinggi membutuhkan pengawasan yang lebih intens. Khususnya untuk pangan segar dirasakan sangat penting untuk peningkatan Pengawasan, registrasi, rekomendasi dan sertifikasi pangan segar di Tahun Anggaran selanjutnya (Tahun 2024).

Selanjutnya adalah Sistem informasi dan data ketahanan pangan belum optimal karena masalah keterbatasan SDM, sarana prasarana dan keterbatasan anggaran. Perlu peningkatan akses terhadap data dan informasi pangan kepada sektor publik melalui aplikasi berbasis online yang didukung oleh Sumber Daya Manusia serta sarana/prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan dinas serta perangkat lunak.

3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional / Internasional

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan DKP saat ini, maka permasalahan dan hambatan yang ada perlu diminimalisir untuk memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah yang fokus kepada penurunan angka kemiskinan. Kondisi ideal yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah :

- a. Meningkatnya angka PPH Konsumsi Pangan mendekati angka ideal beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)
- b. Kemudahan Akses Pangan, Stabilitas Harga Pangan/Stabilitas Harga Pangan Pokok,
- c. Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan angka Neraca Bahan Makanan serta PPH ketersediaan mendekati angka ideal.
- d. Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) untuk dasar bagi *mapping* kegiatan penanggulangan angka kemiskinan di Kota Prabumulih

- e. Terpenuhinya Kuota Cadangan Pangan Pemerintah untuk menangani kondisi darurat mengacu kepada kebutuhan Kota Prabumulih.
- f. Terlaksananya percepatan penganekaragaman pangan melalui Gerakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Obor Pangan Lestari, Pembinaan Halaman Asri Tertib Indah dan Nyaman, Gerakan Tanaman Buah-buahan di Pekarangan, Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Pekarangan. serta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Secara Terpadu.
- g. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat melalui, Penguatan dan Pembinaan Kelompok Pangan Olahan, Pembinaan Kelompok masyarakat yang *concern* terhadap menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), Peningkatan SDM Kelompok Wanita Tani (KWT), Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan secara Terpadu dan Apresiasi Kader Pangan.
- h. Terjaminnya mutu dan keamanan pangan dengan pengawasan, registrasi dan sertifikasi pangan segar
- i. Terkoordinirnya Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan untuk Kota Prabumulih
- j. Promosi produk Pertanian/Perkebunan dan hasil *home industri* kelompok pangan olahan yang optimal
- k. Terciptanya dan Tereksposnya menu-menu baru yang beragam bergizi seimbang dan aman berdasarkan sumberdaya/kearifan lokal.
- l. Terjalinnya kerjasama antar *stakeholder* terkait Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Prabumulih.

4. Tantangan dan Faktor Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat daerah

a. Faktor Tantangan (*Treat*)

1. Mutu produk pangan segar dan pangan olahan masih relatif rendah, serta masih adanya penggunaan bahan kimia berbahaya pada pengelolaan pangan segar dan pangan olahan.
2. Masih belum optimalnya pola konsumsi masyarakat berdasarkan pola pangan harapan (PPH) yaitu ketergantungan terhadap beras dan terigu masih tinggi.

3. Harga Pangan Pokok dan pangan segar yang masih berfluktuasi menjelang HBKN dan atau perubahan cuaca ekstrim.
4. Masih belum terpenuhinya kuota Cadangan Pangan pemerintah Kota
5. Belum optimalnya pemetaan masyarakat rentan pangan dan tahan pangan di Kota Prabumulih
6. Belum terlaksana optimalnya diversifikasi/penganekaragaman konsumsi pangan terutama bagi pemenuhan gizi keluarga yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.
7. Sistem informasi data ketahanan pangan belum optimal karena masalah SDM, sarana prasarana dan keterbatasan anggaran.

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi pemerintah Kota Prabumulih yang sudah tertata dengan baik.
2. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan daerah yang berpartisipasi di Kota Prabumulih.
3. Sumber daya alam hayati dan sumber daya manusia tersedia.
4. Produksi pangan lokal relatif beragam dan cukup tinggi.
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai pangan berkembang pesat.
6. Permintaan konsumen terhadap jenis dan kualitas pangan semakin beragam dan berimbang.
7. Peluang mulai berkembangnya diversifikasi pangan olahan masa kini dengan sistem pemasaran berbasis *online*.
8. Dukungan yang baik dari Tim Penggerak PKK sebagai ujung tombak edukasi dan promosi pola konsumsi pangan ideal
9. Posisi Strategis Kota Prabumulih yang memungkinkan akses yang terbuka bagi pasokan bahan pangan dan berimplikasi positif terhadap stabilnya harga pangan pokok di Kota Prabumulih

5. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Prioritas Tahun yang direncanakan

Isu-isu penting dalam perumusan Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti
- b. Makin tingginya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah kebutuhan pangan (kualitas/kuantitas), beragam, bergizi seimbang dan Aman.
- c. Makin banyaknya produk pangan segar dan olahan yang berkembang di masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan.
- d. Makin meningkatnya teknologi informasi memerlukan SDM yang bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan berdasarkan analisis faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal. Dengan pendekatan SWOT sebagaimana dikemukakan diatas, analisis selanjutnya dilakukan untuk menentukan tingkat *urgensi* dan dampak potensial serta skala prioritas berbagai peluang dan ancaman yang mungkin terjadi. Saran dan Masukan Strategis untuk Tahun selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya stabilisasi harga pangan segar melalui penyediaan pangan dengan mekanisme Toko Tani Indonesia (TTI) dan Operasi Pasar Produk Pangan Segar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
2. Perlu adanya peningkatan pengawasan mutu produk pangan segar dan olahan, serta registrasi/sertifikasi/rekomendasi produk pangan segar untuk menjamin keamanan dan mutu pangan segar di Kota Prabumulih mengingat mobilitas produk masuk dan keluar yang relatif tinggi.
3. Perlu adanya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk mengantisipasi kondisi darurat dan penanganan kerawanan pangan.
4. Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kualitas gizi yang baik, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat, promosi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan yang B2SA perlu ditingkatkan lagi. Terlebih

dengan adanya *mou* dengan Tim Penggerak PKK diharapkan angka PPH konsumsi masyarakat akan meningkat.

5. Lokasi pemetaan masyarakat rentan pangan dan tahan pangan di Kota Prabumulih perlu menjangkau ke seluruh lokasi sehingga upaya penanggulangan bagi masyarakat rentan pangandapat lebih baik lagi.
6. Sistem informasi dan data ketahanan pangan belum optimal karena masalah SDM, sarana prasarana dan keterbatasan anggaran. Perlu peningkatan akses terhadap data dan informasi pangan kepada sektor publik melalui aplikasi berbasis online yang didukung oleh sarana/prasarana seperti kendaraan dinas dan perangkat lunak.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Prabumulih

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam bidang Ketahanan Pangan yang mengacu pada kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kebijakan nasional Ketahanan Pangan difokuskan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Dari aspek ketersediaan yaitu: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan. Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Kebijakan di tingkat Provinsi dan tingkat Kota Prabumulih diselaraskan dengan kebijakan Nasional.

3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Tahun 2024 adalah tahun pertama pencapaian target jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2024-2026 dan tahun akhir pencapaian target jangka menengah pada Rencana Strategis Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 sasaran indikator kinerja ketahanan pangan tahun 2024 adalah :

1. Stok Cadangan Pangan Daerah (Ton) sebesar 12 Ton
2. Koefisien harga Pangan Strategis $\leq 15\%$
3. Pemantauan 11 komoditi pangan pokok yang didistribusikan antar waktu dan antar wilayah koefisien
4. Pencapaian skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 94,8
5. Ketersediaan Energi sebesar 2.400 kkal/kap/hr dan ketersediaan Protein 63 gr/K.Kal/Kap/Hr
6. Persentase Kenaikan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi/terregistrasi 30%
7. Jumlah kab/kota yang Memiliki lembaga sertifikasi pangan segar asal tumbuhan sebanyak 4 Kab/Kota
8. Jumlah rekomendasi, edukasi dan promosi keamanan pangan (lokasi) sebanyak 42 lokasi
9. Penurunan penduduk rawan pangan 1 persen per tahun

Untuk mencapai target Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tahun 2024, beberapa hal prioritas untuk dilakukan yaitu:

1. Tetap melanjutkan upaya: pengentasan daerah rentan rawan pangan; peningkatan diversifikasi pangan; pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; analisis, kajian dan perumusan kebijakan; serta mendukung pengentasan kemiskinan (program bekerja) dan Penanganan permasalahan gizi (stunting).
2. Melakukan transformasi kegiatan dalam rangka menyikapi Dinamika situasi ketahanan pangan dimana perlu dukungan untuk peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditas.
3. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, kita melakukan pemantauan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen melalui kegiatan Panel Harga, Monitoring stok di penggilingan, serta penyelenggaraan bazaar/gelar pangan murah.
4. Dalam rangka pemantapan cadangan beras nasional, DKPP bekerja sama dan Bulog.
5. Dalam upaya mendukung peningkatan daya saing komoditas pertanian segar asal tumbuhan, maka upaya penguatan Kapasitas Kelembangan OKKP perlu dilakukan.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mengacu kepada kebijakan Nasional dan Provinsi kecuali untuk situasi khusus yang disebabkan

sumberdaya luasan produksi pangan/padi yang tidak memadai dan bukan wilayah sentra pertanian tanaman pangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dimaksudkan untuk peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan untuk mendukung Visi Kota Prabumulih “Terwujudnya Kota Prabumulih sebagai Kota Prima dan Berkualitas” yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memberikan arahan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah :

- A. Menjabarkan strategi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih satu tahun kedepan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang ketahanan pangan yang selaras dengan Kebijakan nasional dan Provinsi dengan mempertimbangkan situasi, kondisi serta potensi daerah.
- B. Sebagai pedoman dan acuan kerja bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih serta pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang ketahanan pangan Kota Prabumulih.
- C. Menjadi pedoman dan acuan untuk penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD		Nilai SAKIP Kota	Predikat	BB	B (60-70)	BB (71-75)	A (76-80)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	73,9	70	74	78
			Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	100	100	100	100
2.	Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah		Persentase Ketersediaan Pangan	%		100	100	100
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	94,03	94,1	94,3	94,6
		Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	93,1	91,2	93,7	96,8
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (tiga) Tahun	Ton	32,44	7,8	7,8	7,8
		Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	%	N/A	2,7	0	0
		Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	N/A	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Mengacu kepada Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2	09	03	3.02		Pengelolaan dan Keseimbangan CadanganPangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.04	0003	Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabupaten/Kota
2	09	03	3.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untukPangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2	09	03	3,03	0002	Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kab/Kota
2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Segar Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
X	XX	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
X	XX	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X	XX	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X	XX	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X	XX	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X	XX	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X	XX	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X	XX	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
X	XX	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
X	XX	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	1	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material
X	XX	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X	XX	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel
X	XX	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 yang secara skematis dapat diuraikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab		
				Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Nasional	Daerah						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.492.894.799					4.531.526.780		
2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000					14.000.000		
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA)	3 Dokumen	1 Dokumen	500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	8.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.887.892.099				2.888.326.780		
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Pegawai	88 Orang 36 Bulan	30 Orang/Bulan	2.851.962.099	Dinas Ketahanan Pangan	DAU	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	54 Orang/Bulan	2.850.526.780	Dinas Ketahanan Pangan

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	34.930.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	34.800.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Dokumen	500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1 Dokumen	500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				7.200.000							18.000.000	
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan	7.200.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	18.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000							45.000.000	
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	30 Paket	20.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	30 Paket	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	2 orang	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	15 orang	20.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				282.870.000							436.000.000	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	5.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	5.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	9.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	1 Paket	7.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Materail	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	11.870.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	11.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab				
				Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2 Laporan	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	2 Laporan	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
						Rincian:											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah OH untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah)	1 Laporan	1 Laporan	220.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	370.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah OH Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah)	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											950.000.000	
								148.000.000									
2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	-	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 unit	600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	4 Unit	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	7 Unit	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	3 Unit	18.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	6 Unit	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											3.200.000	
								2.000.000									
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai)	3 Laporan	1 Laporan	2.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	3.200.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											177.000.000	
								131.932.700									
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	19 unit	126.932.700	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	19 unit	170.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan												
2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	11 Unit	5.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	10 Unit	7.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				428.000.000							1.820.000.000	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				183.000.000							830.000.000	
2 09 03 2.01 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	1 Laporan	35.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			KWT	1 Laporan	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	1 Laporan	3.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			Masyarakat kota prabumulih (Desa Pangkul, Desa Muara sungai, Kelurahan Sungai Medang)	1 Laporan	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	300 Keluarga	100 Keluarga	60.000.000	Kota Prabumulih	PAD			KWT	100 Keluarga	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	25.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Laporan	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 0009	Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	-	-	Kota Prabumulih	PAD			KWT	1 Laporan	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	1 Unit	15.000.000	Kota Prabumulih	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	1 Unit	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sum ber Dana	Prioritas			Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 09 03 2.01 0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	10.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Laporan	65.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	3 Laporan	1 Laporan	15.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				135.000.000							600.000.000	
2 09 03 2.02 0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	-	-	BULOG	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.02 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ton Cadangan Pangan Pemerintah	50 Ton	10 ton	120.000.000	BULOG	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	20 ton	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.02 0005	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	30 Ton	0	-	BULOG	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	10 ton	20.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.02 0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	30 Ton	10 ton	15.000.000	BULOG	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	10 ton	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				110.000.000							390.000.000	
2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			6 Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Laporan	2 Laporan	80.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	2 Laporan	340.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Rincian:											
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	3 Laporan	1 Laporan	10.000.000								

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab		
				Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Nasional	Daerah						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Melalui Kegiatan Dapur BZSA)													
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Dapur BZSA)	3 Laporan	1 Laporan	30.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			Anak Sekolah Stunting	1 Laporan	240.000.000			
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat melalui Promosi dan edukasi Produk Pangan lokal Melalui Pameran dan pawai)	3 Laporan	1 Laporan	40.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			Masyarakat Kota Pabumulih	1 Laporan	100.000.000			
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							295.000.000			
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							45.000.000			
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	3 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD	Masyarakat Kota Pabumulih	1 Dokumen	45.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								250.000.000		
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0	-	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD	Masyarakat Kota Pabumulih	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								75.000.000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								75.000.000		
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Kota Prabumulih	PAD	Pedagang dan Petani Kota Prabumulih	1 Dokumen	20.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN | 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Kota Prabumulih	PAD			Pedagang dan Petani Kota Prabumulih	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Kota Prabumulih	PAD			Pedagang dan Petani Kota Prabumulih	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
GRAND TOTAL					3.985.894.799							6.721.526.780	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2023 merupakan bagian yang tak terpisahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Prabumulih. Adapun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan yaitu Program dan Kegiatan Tahun 2024 mengacu ke Kepmendagri-050-5889-Tahun-2021 meliputi Program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini meliputi 4 Kegiatan yaitu

- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- c. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- d. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini meliputi 2 (dua) Kegiatan yaitu

- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini meliputi 1 (satu) Kegiatan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi 8 Kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih 2024-2026. Sedangkan Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih. Apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka Perangkat daerah membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah dokumen perencanaan bidang ketahanan pangan untuk periode 3 (tiga) tahun. Renja ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Prabumulih yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam KInerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renja ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Prabumulih.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Prabumulih dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekertaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Prabumulih berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Prabumulih untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan secara tahun jamak (*multy year*);
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih berkewajiban untuk memandu proses perencanaan

pembangunan, pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Prabumulih, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Pengawasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD);

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :
 - a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (SMART Planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentative dan memiliki kekhususan (Spesific), terukur (Measurable), ketercapaian (Achievable), ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan waktu (Time). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan sinergitas lintas PD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat, terdiri atas : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah; kemandirian energy dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan.
 - b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencana (Plan), Kerjakan apa yang telah direncanakan (Do), Periksa atau monitor pelaksanaan (Check), dan Aksi tindak lanjut (Action). Untuk memudahkan RPJM Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan, maka digunakan pembagian peran PD untuk melaksanakan RPJM Daerah berdasarkan misi pembangunan, dengan membagi peran PD.
 - c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (accountability) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
 - 1) Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*)
 - 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*)
 - 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*)

- d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*Money Follow Program Selected Policy*)
 - e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
 - 1) *Desk monitoring* dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output;
 - 2) *Desk akuntabilitas* untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.
8. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 belum dapat dilakukan karena tahun 2024 adalah tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, namun evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 .

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Karena itu, Renja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024.

Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih merupakan cara untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Pelaksanaan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun sebagai Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja lebih baik dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.